

DAYA UNGKIT WISATA UTARA

Lokasi TKN Diusulkan untuk Water Boom

PENGASIH (KR) - Lokasi rencana pembangunan Taman Kerajaan Nusantara (TKN) di Kapanewon Girimulyo diusulkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulonprogo, H Ponimin Budi Hartono SE MM untuk dialihfungsikan menjadi objek wisata "Water Boom". Sebab dengan obwis tersebut akan menjadi daya ungkit pengembangan wisata di wilayah utara.

"Pada era pemerintahan Hasto Wardoyo, pemkab mewacanakan pembangunan TKN di Girimulyo, dan sudah ada feasibility study (FS) atau studi kelayakan, tetapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Bila rencana itu dibatalkan, bagaimana dialihfungsikan pemanfaatannya menjadi objek wisata water boom, agar wilayah utara semakin menarik sebagai pusat wisata baru," ujar Ponimin, Kamis (21/1).

Wilayah utara yakni Kapanewon Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh sekarang sedang berkembang kawasan wisata berbasis agrowisata dengan menawarkan pemandangan persawahan, dan perbukitan Menoreh. Pembangunan objek wisata water boom ini bisa diusulkan memakai dana keistimewaan (danais).

Sangat disayangkan, uji kelayakan dan rencana induk yang sudah dibuat tidak dimanfaatkan. Saya yakin penunjukkan Girimulyo menjadi wilayah rencana pembangunan Taman Kerajaan Nusantara sudah berdasarkan kajian potensi. Hal ini

tinggal dilanjutkan," ucapnya.

Taman Kerajaan Nusantara, menurut Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulonprogo R Heriyanto SH MM, sudah dibuat FS-nya. Tetapi kebutuhan anggarannya sangat tinggi, sekitar Rp 8 triliun. Maka rencana pembangunannya ditangguhkan. Kalau tata ruang tidak ada persoalan, namun semua tergantung pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pembangunan TKN, dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo Joko Mursito SSn MA, dibutuhkan dana sangat besar karena diproyeksikan setiap anjungan satu kerajaan membutuhkan lahan seluas satu hektare. "Sampai saat ini, berhenti sampai proses studi kelayakan (FS)," ungkapnya.

Ditundanya pembangunannya, karena pemkab masih fokus pada penyelesaian Taman Budaya Kulonprogo. "Investor yang awalnya tertarik membangun taman kerajaan nusantara sudah tidak ada informasi kelanjutannya. Maka pembangunannya hanya menunggu investor," tambahna.

Taman Kerajaan Nusantara seperti diketahui digagas mantan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. Pemkab sudah menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Indonesia Representative Kent-Super Industries Limited pada April 2019, tetapi hingga saat ini belum direalisasikan. (Wid)-f

Longsor di Girisubo dan Patuk

WONOSARI (KR) - Hujan deras yang terjadi selama dua hari menimbulkan bencana longsor di Kapanewon Patuk dan Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Rabu (20/1) kemarin. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Edy Basuki MSi menuturkan dampak hujan deras menimbulkan longsor sebuah talud sepanjang 7 meter di Padukuhan Ngelo 2, Kalurahan Balong, Girisubo dan tanah milik Ny Aminah (70) warga Padukuhan Ngrancahan, Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk. Tidak menimbulkan korban dalam kejadian ini tetapi dampak longsor mengganggu aktifitas warga dan mengancam sejumlah permukiman.

"Beruntung material longsor menimpa ke area persawahan dan tidak berdampak pada pemukiman warga," katanya, Rabu (20/1) sore.

Informasi di lokasi kejadian menyatakan peristiwa bermula saat hujan deras terus menerus yang terjadi di wilayah Kapanewon Girisubo dan Kapanewon Patuk, Gunungkidul. Durasi dan intensitas hujan yang cukup lama dan deras hingga menimbulkan terjadinya genangan maupun aliran air di lokasi sekitar talud yang am-

broil. Berselang beberapa waktu kemudian, bunyi gemuruh terdengar diikuti dengan longsonya talud ruas jalan Kalurahan Balong, Girisubo. Longsor dalam waktu yang hampir bersamaan juga terjadi di tanah pekarangan milik Ny Aminah warga Padukuhan Ngrancahan, Pengkok, Patuk.

"Dari kejadian itu kami langsung menerjunkan personel ke lokasi dan untuk material longsor telah berhasil dievakuasi," ucapnya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya bencana susulan yang dimungkinkan terjadi pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi longsor. Ada lima kapanewon yang saat ini dipetakan menjadi kawasan rawan longsor yakni Kapanewon Semin, Nglipar, Ngawen, Patuk, Gedangsari dan Ponjong. Lokasi-lokasi itu selama ini menjadi kawasan langganan bencana longsor mengingat karakteristik alam wilayahnya merupakan daerah perbukitan. Sedangkan untuk wilayah rawan banjir ada di sepanjang aliran Sungai Oya dan Sungai Besole, Baleharjo dan Siraman, Wonosari. "Kami sudah intens meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana," ucapnya. (Bmp)-f

PILUR SERENTAK KULONPROGO 2021

Kalurahan Wajib Anggarkan APD Covid-19

WATES (KR) - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mewajibkan kalurahan penyelenggara Pemilihan Lurah (Pilur) 2021 mengalokasikan anggaran pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Pilur yang hendak diselenggarakan serentak di Kulonprogo akan diikuti sebanyak 68 kalurahan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDP2KB) Kulonprogo, Jumarna mengungkapkan pada penyelenggaraan Pilur serentak yang dijadwalkan September 2021, pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Untuk mencegah terjadi penularan Covid-19 pada penyelenggaraan Pilur, mensyaratkan kalurahan mengalokasikan anggaran pendanaan APD di Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) 2021," ujar Jumarna.

Menurutnya, Pilur dapat diselenggarakan dengan mentaati protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. APD wajib bagi panitia penyelenggara Pilur maupun warga pemilih yang akan menggunakan hak pilih pada pemungutan suara di TPS

(Tempat Pemungutan Suara).

Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Risdianto menjelaskan pengadaan APD tidak masuk instrumen yang dianggarkan Pemkab untuk penyelenggaraan Pilur serentak.

Item APD yang harus diadakan kalurahan, meliputi masker untuk panitia penyelenggara Pilur, hand sanitiser, alat pengukur suhu badan, sarung tangan karet untuk panitia, sarung tangan sekali pakai untuk warga pemilih dan tempat pencuci tangan.

"Di setiap TPS dipasang pembatas transparan antara panitia dengan pemilih. Kemudian disinfektan untuk mensterilkan TPS sebelum dan sesudah pemungutan suara dan obat-obatan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)," ujar Risdianto.

Menurutnya, Pilur serentak diikuti sebanyak 68 kalurahan untuk mengisi kekosongan jabatan lurah yang telah berakhir masa jabatan hingga di 2021. Sebanyak 35 lurah hasil Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) 2015 akan berakhir masa jabatannya di 31 Oktober 2021. (Ras)-f

WASPADAI BENCANA ANGIN KENCANG

Pangkas Pohon Rawan Tumbang

WONOSARI (KR) - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul Edi Basuki MSi mengungkapkan, masyarakat perlu untuk mewaspadaai ancaman bencana angin kencang. Pasca terjadinya angin puting beliung di kawasan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, perlu masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

"Cuaca sekarang ini perlu untuk diwaspadai. Karena ancaman angin kencang dapat terjadi di mana saja. Artinya semua wilayah di Gunungkidul memiliki potensi terjadi bencana tersebut," kata Kepala BPBD Gunungkidul Edi Basuki MSi, Kamis (21/1).

Diungkapkan, selain kewaspadaan, juga perlu untuk memangkas ranting maupun pohon yang rawan tumbang. Hal tersebut untuk mencegah atau meminimalisir ter-

jadinya kerugian. Karena data 2020 angin kencang pernah terjadi di Kapanewon Gedangsari, Nglipar dan Karangmojo. Namun memang bencana ini bisa terjadi di seluruh kapanewon.

"Memang ada 3 kejadian pada 2020 bencana angin kencang. Sudah dilakukan upaya penanganan di lapangan," ucapnya.

Edi menambahkan, dalam bencana angin kencang yang terjadi di Gunungkidul 2020 merusak puluhan rumah. Penanganan bencana melibatkan Tim Reaksi Cepat, TNI, Polri, Pusdalops dan masyarakat.

Jika terjadi cuaca yang berpotensi angin kencang, masyarakat perlu berhati-hati. Meningkatkan kewaspadaan dan bisa membaca terjadi perubahan cuaca. "Selain angin kencang juga perlu untuk diwaspadai bencana longsor di Gunungkidul," jelasnya. (Ded/Bmp)-f

AKIBAT TERKENDALA SISTEM

Pasien Terdampak Covid-19 Tak Dapat Bantuan

WONOSARI (KR) - Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (Isoma) awal tahun ini tidak bisa berharap akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah kabupaten. Karena hingga saat ini, pemkab belum bisa mencairkan dan sementara anggaran tahun lalu sudah habis. "Kita berharap ada bantuan sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19," kata Wakil Bupati Gunungkidul Imawan Wahyudi MH, Kamis (21/1).

Bantuan pemerintah kepada masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri akibat terkonfirmasi positif Covid-19 belum bisa dicairkan sehingga sangat memerlukan bantuan dari provinsi dan paling rasional isolasi mandiri yang terstruktur, terarah, dan terpantau untuk itu perlu biayanya.

Belum dapat dicairkannya anggaran untuk warga terdampak Covid-19 tersebut karena adanya sistem baru yang ditetapkan pemerintah pusat menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SI-PKD). "Dengan sistem yang

baru ini masih memerlukan waktu untuk penyelesaian,' imbuhnya.

Meskipun pencairan terkendala sistem pihaknya meyakini bahwa masyarakat yang menjalani isolasi mandiri mendapatkan kebutuhan pangan yang layak. Hal itu dilihat dari semangat gotong royong selama masa pandemi ini tidak hanya kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan sering diberikan warga yang lain.

Sikap masyarakat sangat sigap membantu, namun berat dalam situasi seperti ini harus disubveni, hal ini perlu disubsidi sehingga pemerin-

tah juga punya kewajiban moral untuk mengingatkan. Sedangkan untuk menekan banyaknya warga yang menjalani isolasi, Wabup Gunungkidul berharap masyarakat untuk tetap patuh protokol kesehatan. Dengan demikian, penularan virus dapat ditekan dan diharapkan rantai penularan dapat diputus.

Dari hasil pemantauan kondisi di sejumlah wilayah masih ditemukan adanya warga keluar rumah yang tidak menggunakan masker.

Persentasenya 30-40 persen tidak taat penggu-

naan masker dan hal ini menunjukkan tingkat kesadarannya perlu ditingkatkan. " Karena itu harus diingatkan bahwa penggunaan masker jangan dianggap sepele," paparnya " ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Siwi Irawati mengakui untuk bantuan sembako kepada warga positif Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri sudah habis sejak 2020 lalu. Pihaknya sudah menyalurkan lebih dari 1.000 paket sembako bagi masyarakat terdampak Covid

Paket tersebut berasal dari Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), APBD 2020, dan juga bantuan pihak ketiga. "Kami berharap bantuan dapat dicairkan. "Anggaran untuk tahun 2020 sudah habis, dan sekarang masih dalam proses," terangnya. (Bmp)-f

Petugas Tegur 74 Pengelola Tempat Usaha

WATES (KR) - Sebanyak 74 pengelola tempat usaha mendapat teguran dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo.

Kasat Pol PP Drs Sumiran membenarkan, selama sepuluh hari pelaksanaan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) pihaknya menegur puluhan pengelola tempat usaha karena melanggar batas maksimal jam operasional malam yakni pukul 19.00 WIB dan tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes).

"Ke-74 tempat usaha yang kami

tegur kebanyakan usaha toko waralaba dan kuliner termasuk di sepanjang perempatan Nanggulan ke barat," katanya, Rabu (20/1)

Ditegaskan, teguran masih bersifat lisan. Tapi kalau nanti dalam perkembangannya para pelaku usaha masih ngeyel melanggar peraturan selama PTKM maka pihaknya akan memberi teguran berupa surat peringatan hingga penutupan sementara tempat usaha," ujar Sumiran saat dihubungi, Rabu (20/1).

Sumiran mengungkapkan sebelum mengambil tindakan, pihaknya sudah mensosialisasikan beberapa

peraturan yang berlaku selama PSTKM.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo berharap masyarakat mematuhi semua aturan terkait PTKM. Berdasarkan pantauannya, secara umum masyarakat sudah tertib dalam penerapan prokes.

"Kendati kesadaran prokes masyarakat pada masa PTKM sudah tinggi tapi petugas kami masih tetap menemukan ada pelanggaran prokes terutama yang berkaitan dengan pemakaian masker," tuturnya. (Rul)-f

DINKES SOSIALISASI KEDUA SECARA 'WEBINAR'

Bupati: Vaksinasi Covid-19 Penting



Bupati Drs H Sutedjo (kanan) dan Wabup Fajar Gegana saat Rakor Penanganan Covid-19

WATES (KR) - Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo meminta masyarakat jangan percaya berita hoaks atau berita bohong tentang vaksinasi Covid-19. Agar tidak "tersesat" sebaiknya masyarakat mencari informasi kebenarannya kepada pemerintah kabupaten terutama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten, kecamatan maupun kalurahan.

"Mengingat pentingnya vaksin sebagai upaya pencegahan agar tak terpapar Covid-19, saya mengimbau masyarakat menyuksekkan program vaksinasi dengan kesadaran sendiri dan senang hati menerima vaksin atau mau divaksin, sehingga ada kekebalan tubuh dalam menangkal virus Korona," kata bupati kepada KR di ruang kerjanya, Kamis (21/1).

Vaksin Covid-19 sama dengan vaksin-vaksin lain seperti vaksin cacar dan polio yakni mencegah agar tidak terserang. "Sekali lagi vaksin Covid-19 sangat penting, meskipun kebijakan pemerintah pusat untuk tahap pertama, Kulonprogo belum termasuk prioritas awal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tapi pemkab terkesiap dengan menyusun daftar nama para pejabat, tokoh dan tenaga kesehatan (nakes) yang siap divaksin," tegas Sutedjo.

Wabup sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo Fajar Gegana menegaskan, pemerintah melaksanakan program vaksinasi sudah melalui proses dan tahapan panjang termasuk pertimbangan para ahli. Sehingga tak ada alasan bagi siapapun menolak vaksinasi, karena untuk kebaikan semuanya. "Hoaks tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga kami minta masyarakat menerima dengan sikap positif vaksin agar kita selamat dari paparan Covid-19. Pemerintah pasti memberikan yang terbaik bagi rakyatnya," tegas Fajar optimis masyarakat mengindahkan ajakan mensuksekkan program vaksinasi Covid-19.

Sebelumnya Dinkes Sosialisasi II Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 melalui webinar diikuti para perangkat daerah, fasilitas kesehatan, unsur RSUD, Puskesmas dan unsur masyarakat di Command Room Diskominfo, Selasa (19/1). "Program vaksinasi Covid-19 resmi dimulai 13 Januari 2021. Khusus DIY penancangannya 14 Januari 2021 di Pemda DIY. Sedangkan untuk kabupaten/kota diawali Sleman dan Kota Yogyakarta sementara Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul dilaksanakan setelah vaksin tersedia. Sekitar Februari vaksinnya datang. Vaksin Sinovac aman tak mengandung bahan membahayakan dan dijamin kehalalannya sesuai Fatwa MUI nomor 2/2021," jelas

Kepala Dinkes dr Sri Budi Utami menambahkan penerima vaksin pertama para nakes.

Pemberian vaksin untuk masyarakat diperkirakan April 2021 mendatang. "Sosialisasi persiapan pelaksanaan vaksinasi sesuai data dan fakta, agar masyarakat tidak salah persepsi. Dengan sosialisasi masyarakat diharapkan lebih siap dan mantap serta tenang menerima vaksinasi Covid-19," tuturnya.

Jubir Gugus Tugas Covid-19 Kulonprogo drg Banih Rahayujati mengatakan, vaksin informasi obat sebagaimana informasi yang beredar, tapi upaya pencegahan. Sehingga harus tetap berpedoman prokes, menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) demi keselamatan bersama. "Vaksinasi salah satu cara menurunkan penderita, mencegah keparahan penderita sekaligus mencegah kematian akibat Covid-19," jelasnya.

Semakin banyak masyarakat divaksin, 70% dari jumlah penduduk diharapkan mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Yaitu suatu bentuk perlindungan tak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi kebal terhadap infeksi baik melalui infeksi sebelumnya atau vaksinasi sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi. (Rul)

Vaksinasi Covid-19 Tidak Direkomendasikan Bagi:



- 1 Pasien dengan kondisi imunokompromais atau pasien yang memiliki daya kekebalan tubuh rendah seperti penderita HIV atau penyakit kronis.
- 2 Ibu hamil dan menyusui, anak berusia di bawah 18 tahun dan lansia lebih dari 60 tahun serta usia 18-59 tahun yang memiliki komorbid seperti hipertensi, diabetes melitus, jantung, ginjal, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).
- 3 Tidak ada anggota keluarga serumah yang kontak erat/ suspek/ konfirmasi/ sedang dalam perawatan karena penyakit Covid-19.